



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 20
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 13 September 2021.
Waktu	: Pukul 14.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 2. Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2021 3. Isu – Isu Aktual
Ketua Rapat	: Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 42 dari 50 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 6 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. (HIMPUH, SAPUHI, AMPUH, ASPHURI, AMPHURI, ASPHURINDO, KESTHURI, GAPHURA)

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.32 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., dengan didampingi Ketua Komisi VIII H.Yandri Susanto, S.Pt dan Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Audiensi **DEWAN PENGURUS PUSAT FORUM LINTAS ASOSIASI PENYELENGGARA UMRAH DAN HAJI KHUSUS** dengan Komisi VIII DPR RI maka dapat di catat berbagai masukan sebagai berikut:

1. Bahwa penghentian pemberangkatan Haji dan Umrah selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sejak moratorium umrah karena pandemi covid-19 tanggal 27 Februari 2020 telah berdampak kepada keberlangsungan usaha bagi 1.476 PPIU dan 400 PIHK di Indonesia.
2. Perlunya bantuan dan stimulus dari pemerintah untuk PPIU/PIHK yang mengalami kerugian akibat penghentian pemberangkatan Haji dan Umrah sebagai dampak pandemi covid-19.
3. Bahwa sebagian besar PPIU/PIHK telah membayarkan dana Haji dan Umrah kepada penyedia layanan seperti Airlines, Hotel, Provider Visa dan lainnya, dimana hanya baru maskapai penerbangan Saudi Airlines (SV) yang sudah memberikan *refund* kepada PPIU yang menyebabkan banyak PPIU yang mengalami kerugian.
4. PPIU/PIHK menyampaikan permohonan bantuan stimulus dari pemerintah melalui komisi VIII DPR RI berupa :
  - a. Bantuan dan Stimulus Finansial.
  - b. Bantuan dan Stimulus Non Finansial dalam bentuk Relaksasi Peraturan Perundang-Undangan termasuk kewajiban Sertifikasi/Akreditasi PPIU dan/atau PIHK, Bank Garansi dan kebijakan lainnya.
5. Dalam merespon penjelasan dan masukan DEWAN PENGURUS PUSAT FORUM LINTAS ASOSIASI PENYELENGGARA UMRAH DAN HAJI KHUSUS Komisi VIII DPR RI memberikan tanggapan sebagai berikut :
  - a. Bahwa perhitungan atas bagi yang mengalami kerugian PPIU dan PIHK dan permohonan stimulus yang diharapkan harus diuraikan secara rinci dan detail sehingga ada akuntabilitas, rasionalisasi dan transparansi laporan kondisi keuangan penyelenggara haji dan umrah.

- b. Perlunya pendalaman melalui Rapat Lanjutan (FGD) untuk membahas secara rinci rencana permohonan Bantuan dan Stimulus Finansial dan Non Finansial PPIU dan PIHK termasuk kesiapan memberangkatkan Jamaah Haji dan Umrah jika penyelenggaraan Haji dan Umrah dibuka kembali.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.40 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
WAKIL KETUA,



Hj. DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si.,